

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 120 TAHUN 2004

PERTAMBANGAN

Potret Buram Berserakan

SUMBANGAN SEKTOR PERTAMBANGAN TERUS MENURUN DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR. MENUNGGU SIKAP JELAS PEMERINTAH.

MIMPI buruk masih menghantui dunia pertambangan Indonesia. Potensi mineral yang luar biasa tak membuat pelaku di bisnis ini nyaman sentosa. Sebagian di antara mereka bahkan dibelit waswas setiap saat. Ingat kasus Teluk Buyat di Sulawesi Utara, atau Kelian Equatorial Mining di Kalimantan Timur.

Kasus Buyat menempatkan Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya sebagai tersangka tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Ia kini tahanan kota setelah sempat mendekam di penjara beberapa bulan. Kasus ini mencuat justru ketika tambang emas milik Newmont di Minahasa ditutup karena cadangan emasnya memang sudah habis.

Di Kelian, tiga pekan lalu, lebih dari seratus orang memblokade Pos 235, satu-satunya pintu masuk Kelian lewat darat. Mereka menuntut pembayaran ganti rugi Rp 186 miliar. Akibatnya, para pekerja Kelian tak bisa keluar-masuk, pasokan makanan dan bahan kebutuhan pertambangan terganggu.

Padaahal, kata Direktur Utama Kelian, Arif Siregar, perusahaannya sudah membayar ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya dipakai lokasi penambangan. Saking geramnya, Arif memperingatkan pemerintah: "Bila masih ada pemblokiran, kami akan menyatakannya *force majeure*."

Newmont dan Kelian, yang akan ber-

akhir masa produksinya Februari tahun depan, adalah dua di antara potret buram yang berserakan di berbagai kawasan pertambangan Indonesia. Tiga perusahaan pertambangan lain telah menutup operasi atau menyatakan ketidaksanggupannya melanjutkan kontrak karya karena berbagai masalah.

Nusa Halmahera Mineral di Maluku, Indo Muro Kencana dan Candelito Coal di Kalimantan Selatan, semuanya tak berakhir dengan mulus. Adapun BHP Biliton, karena aturan yang tak jelas mengenai hutan lindung, sudah menyatakan keluar dari rencananya mengeksplorasi nikel di Pulau Gag, Maluku.

Anang Rizkani Noor, pejabat sementara Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) dan juru bicara PT Rio Tinto Indonesia, mengatakan Indonesia sudah mulai menjadi tempat tak menarik bagi tujuan investasi pertambangan. Banyak sekali masalah di sini, dan jalan keluarnya tak kunjung dicarikan.

Satu di antara isu kontroversial tahun ini adalah tumpang-tindih perizinan antara hutan lindung dan pertambangan. Pada mulanya, Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999 melarang kegiatan penambangan di hutan lindung. Tapi pemerintah Megawati kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2004, yang didukung DPR, untuk mengubah aturan itu.

Akhirnya, semua perizinan sebelum Undang-Undang Kehutanan disahkan dinyatakan tetap berlaku. Presiden juga mengeluarkan Keputusan Presiden No. 41/2004 yang menyatakan 13 perusahaan diizinkan beroperasi di hutan lindung. Dalam perpu itu, perusahaan akan mendapat hak pinjam pakai maksimal lima tahun dari Menteri Kehutanan.

Sikap pemerintah itu diprotes kalangan aktivis lingkungan. Yang mengkhawatirkan, jika 145 perusahaan pertambangan lainnya juga meminta izin yang sama, sekitar 11,5 juta hektare hutan harus dilepaskan dulu untuk kegiatan survei pertambangan. Namun, ancaman investor pertambangan untuk menempuh jalur arbitrase bila izin mereka dibatalkan rupanya lebih menakutkan pemerintah.

Padaahal, keabsahan perizinan pertambangan itu tidak pernah diperiksa satu per satu. Taman Nasional Batang Gadis di Mandailing Natal, misalnya, bertumpang-tindih dengan izin pertambangan Sorik Mas Mining. Ternyata, Departemen Kehutanan memegang bukti bahwa kawasan itu sudah ditetapkan sebagai hutan lindung sebelum pertambangan masuk.

Perpanjangan pinjam pakai oleh Departemen Pertambangan rupanya tidak seizin Menteri Kehutanan. Sebaliknya pada kasus Pulau Gag, dari kawasan peruntukan lain lalu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Penerimaan Negara Sektor Pertambangan Umum (dalam juta rupiah)

Jenis Penerimaan	2001		2002		2003	
	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Bukan Pajak	2.618.612	2.379.997	1.950.240	81,94	2.413.109	1.869.654
luran tetap	31.641	46.684	34.160	73,17	45.692	27.889
Royalti	848.821	608.275	701.091	115,26	626.403	810.652
DHPB	1.738.149	1.725.037	1.214.988	70,43	1.741.013	1.031.112
Pajak	5.478.575	3.827.922	3.932.930	102,74	4.019.318	1.302.007
PKP2B	2.503.093	1.165.899	1.943.120	166,66	1.224.193	371.030
KK	2.535.266	2.662.023	1.878.546	70,57	2.795.124	930.976
KP	440.215		111.263			
Total	8.097.188	6.207.929	5.883.170	94,7	6.432.427	3.171.662

SUMBER : DITJEN GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 2004

35.000
HA HUTAN
PAPUA RUSAK
TERTIMBUN TAILING
FREEPORT

>35%
DARATAN
INDONESIA
SUDAH
DIBERIKAN
UNTUK
PERTAMBANGAN

TEMPO/ARIE BASUKI

Investor pertambangan, kata Anang, meminta pemerintah segera mengajukan dan menetapkan Undang-Undang Pertambangan yang baru.

Mereka berharap pemerintah daerah dilibatkan sejak awal. Selain itu, investor mengharapkan undang-undang baru bisa menjamin stabilisasi pajak dan melindungi mereka dari peraturan daerah yang tidak terukur. "Bila ada sepuluh peraturan yang berbeda, kami sulit memenuhinya," kata Anang. Yang kedua adalah koreksi secepat mungkin atas semua kebijakan yang simpang-siur, tidak konsisten, dan tumpang-tindih.

Akan halnya Peraturan Menteri Kehutanan No. 12/2004, protes juga datang dari Ketua Kompartemen Pertambangan Kadin, Dito Ganinduto. Peraturan menteri itu, katanya, justru menghambat investasi di pertambangan karena semua kegiatan di hutan lindung harus dilaporkan ke Menteri Kehutanan. "Menteri Kehutanan kan bukan departemen induknya," katanya.

Kadin meminta pemerintah mencabut ketentuan itu dan semua peraturan di bidang lingkungan yang jadi penghambat. "Standarnya harus disesuaikan,"

kata Dito sembari menyebut soal standar pembuangan limbah ke perairan.

Dito mengutip data Kadin yang menunjukkan penurunan minat investor pertambangan masuk Indonesia. Pada 2002, *mineral potential index* (MPI) Indonesia berada di peringkat ke-16 dari 47 negara, tapi *policy potential index* (PPI) berada di urutan paling buncit. Padahal, pada 2000-2001, peringkat MPI Indonesia masih ke-12 dari 35 negara, dan PPI di urutan ke-27. Artinya, meski potensi mineral Indonesia bisa dibilang luar biasa, tingkat kenyamanan investor di sektor pertambangan di Indonesia berkurang.

Penurunan peringkat kenyamanan berinvestasi itu langsung terlihat pada kinerja ekspor sejumlah produk mineral Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ekspor batu bara, yang pada 2002 mencapai 74,178 juta ton, turun jadi 36,5 juta ton pada tahun berikutnya. Ekspor emas, yang pada 2002 mencapai 103.563 ton, tahun berikutnya tinggal 18.007 ton. Ekspor timah, yang pada 2002 masih 62.031 ton, turun jadi 5.798 ton pada 2003.

Penurunan itu pada akhirnya menyebabkan penerimaan negara 2001-2003

juga susut. Sementara pada 2001 penerimaan negara dari sektor ini—berupa pajak dan royalti—masih Rp 8 triliun, dua tahun berikutnya tak ada separuhnya (lihat tabel). Dibandingkan dengan targetnya pun, penerimaan negara di sektor itu ternyata masih sangat kecil. Pada 2003, misalnya, dari target Rp 6,4 triliun, yang tercapai cuma Rp 3,2 triliun.

Penurunan penerimaan negara sekitar 60 persen itu bisa dipahami karena terus menurunnya investasi di sektor pertambangan. Menurut PriceWaterhouseCooper, sementara pada 1998 investasi itu masih US\$ 2 miliar, pada 2002 tinggal US\$ 156 juta. Dan bila awan kelabu masih meliputi bisnis ini, 500 sarjana tambang akan menganggur setiap tahunnya.

Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan pemerintahan baru. Jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, berbagai kekayaan alam Indonesia akan tetap tinggal di perut bumi. Padahal, kita sedang membutuhkan dana sangat besar untuk keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan.

I G.G. Maha Adi

46

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">JAN</td> <td style="width: 12.5%;">FEB</td> <td style="width: 12.5%;">MAR</td> <td style="width: 12.5%;">APR</td> <td style="width: 12.5%;">MEI</td> <td style="width: 12.5%;">JUN</td> <td style="width: 12.5%;">JUL</td> <td style="width: 12.5%;">AGST</td> <td style="width: 12.5%;">SEPT</td> <td style="width: 12.5%;">OKT</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%;">NOV</td> <td style="width: 12.5%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td style="border: 1px solid black; border-radius: 50%;">11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 6 TAHUN 2004																																												

PT Batutua akan eksplorasi tembaga

AMBON (Antara): PT Batutua Kharisma Permai (BKP) akan melakukan eksplorasi tembaga dan barit di Lerokis, Kalikuning, Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Wilayah ini pernah menjadi daerah pertambangan emas PT Prima Lirang Mining dan telah diakhiri prosesnya (terminasi) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 18 Oktober 2004.

Dirut PT BKP, Gerry Mbatemooy, mengemukakan kegiatan eksplorasi ini masih menunggu SK Kuasa Pertambangan (KP) dari Pemkab MTB yang telah diajukannya, sejak Juni lalu.

"Saya baru kembali dari Saumlaki, Ibu Kota Kabupaten MTB dan bertemu dengan Kadis [kepala dinas] Pertambangan setempat, di mana dijanjikan usai Idul Fitri SK KP sudah bisa dikeluarkan," katanya, kemarin.

Gerry yang saat PT Prima Lirang Mining beroperasi untuk penambangan emas memangku jabatan *general manager* itu mengisyaratkan, bila SK KP dikeluarkan Bupati MTB, maka kegiatan mobilisasi peralatan dilakukan Desember, selanjutnya eksplorasi dimulai Januari 2005.

"Saya sudah melaporkan rencana kerja dan anggaran eksplorasi kepada Gubernur Maluku dan Pemkab MTB dengan sasaran antara lain kegiatan pemboran inti 4.000 meter atau 40 lubang dengan kedalaman masing-masing 100 meter per lubang," ujarnya.

Begitu pula dengan, kegiatan studi metalurgi dan analisa laboratorium untuk mengetahui bagaimana mengurangi kadar arsenik yang terkandung dalam batuan tembaga di Pulau Wetar. "Hasilnya akan diteliti pada laboratorium di Perth, Brisbane, dan Darwin [Australia] guna mengetahui deposit tembaga," tutur Gerry.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT **NOV** DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2004

Komisi I DPRD Sidak ke Lokasi

Penambangan Pasir Masih Berlangsung

CIANJUR, (PR).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Cianjur mempertanyakan masih berlangsungnya kegiatan penambangan pasir pantai di daerah Cianjur Selatan. Padahal dari keterangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kab. Cianjur, kegiatan penambangan pasir besi tersebut telah dihentikan sejak September lalu.

Menurut Ketua Komisi I, Moh. Isnaeni, S.H., masih berlangsungnya kegiatan penambangan pasir ini terlihat ketika ia datang ke daerah Sindangbarang dan Cidaun. Selasa (9/11) lalu menemukan satu rombongan kendaraan yang terdiri dari enam buah truk yang mengangkut pasir besi. Selain itu, anggota dewan dari Fraksi Golkar tersebut juga menemukan masih berlangsungnya kegiatan penambangan pasir di daerah Sereg Kec. Sindangbarang dan daerah Jayagiri Kec. Cidaun.

"Dengan masih berlangsungnya aktivitas penambangan, kami berpendapat kalau keterangan yang diberikan pihak eksekutif kepada dewan soal penutupan penambangan pasir di daerah Cianjur Selatan adalah sebuah kebohongan," ujar Isnaeni yang dihubungi, Rabu (10/11).

Menurut Isnaeni, pihaknya juga menemukan sejumlah kegagalan lain dalam perizinan penambangan pasir besi yang diberikan kepada sejumlah perusahaan penambangan. Salah satunya adalah adanya keterangan yang mengatakan kalau untuk

pengurusan izin penambangan pihak perusahaan harus mengeluarkan dana hampir Rp 20 juta kepada oknum di Dinas PSDAP.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan sesungguhnya, di mana kegiatan penambangan pasir besi di daerah Cianjur Selatan yang berlangsung sejak tahun 2001 ini belum memberikan pemasukan satu peser pun kepada kas daerah.

"Dari keterangan sejumlah pekerja yang kami temui di lapangan, untuk pengurusan izin pihak perusahaan harus mengeluarkan dana sampai Rp 20 juta. Sedangkan untuk perpanjangan izin ditarik dana Rp 5 juta dan dana ini diberikan kepada seorang petugas dari Dinas PSDAP," kata Isnaeni.

Penambangan liar

Secara terpisah, Kepala Dinas PSDAP Kab. Cianjur Ir. Bambang Sukirman mengakui kalau saat ini di daerah Cianjur Selatan masih ada kegiatan penambangan pasir besi. Namun, kegiatan penambangan tersebut adalah penambangan liar, karena sejak bulan September lalu izin penambangan pasir besi yang diberikan pihaknya kepada delapan perusahaan sudah habis masa berlakunya.

"Kalau saat ini ada kegiatan penambangan, itu adalah kegiatan liar yang tidak berizin," kata Bambang yang dihubungi melalui pesawat telepon, Rabu (10/11).

Dari informasi yang diperoleh "PR", kegiatan penambangan pasir besi di daerah pesisir pantai Cianjur Selatan telah berlangsung sejak tahun 2001. (A-104)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 14										TAHUN 2004																																		

Antam Pastikan Proyek Tayan 65% Dibiayai Pinjaman

Jakarta, *Bisnis RM*

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) memastikan, sebesar 35% pendanaan proyek Chemical Grade Alumina (CGA) di Tayan di Kalimantan Selatan akan dibiayai sendiri dan 65% menggunakan dana pinjaman.

Proyek yang diperkirakan menelan investasi US\$ 220 juta, sebesar US\$ 77 juta berasal dari ekuitas. Rinciannya, sebesar US\$ 30-35 juta menjadi beban Antam dan sisanya menjadi tanggungan bersama dengan mitra internasionalnya yang kini masih dinegosiasikan. Sisanya sebesar US\$ 143 juta berupa kredit ekspor oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Skim pendanaan itu masih bisa berubah tergantung negosiasi. Bisa 30% ekuitas dan 70% pinjaman. Tapi untuk sementara pembagiannya seperti itu. Untuk pendanaan US\$ 30-35 juta, Opsi lain, kata Direktur Keuangan Antam Kurniadi Atmosasmito di Jakarta, belum lama ini adalah melalui kerjasama dengan mitra strategis serta dan menjual aset non produktif.

Kurniadi menjelaskan, untuk pelepasan aset non produktif ditargetkan bisa diperoleh dana sekitar US\$ 10 juta. Mungkin akhir tahun ini direalisasikan, karena revaluasi aset masih berjalan. ● iec